

## IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN PERBATASAN DARAT RI-PNG

Irvan Yusri<sup>1\*</sup>, Mhd Halkis<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan, <sup>2</sup>Universitas Pertahanan, <sup>3</sup>Sesko TNI

<sup>1</sup>[irvany1607@gmail.com](mailto:irvany1607@gmail.com), [halkis@unsurya.ac.id](mailto:halkis@unsurya.ac.id)

\* email penulis/koresponden: [irvany1607@gmail.com](mailto:irvany1607@gmail.com)

**Abstrak.** Pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan darat RI-PNG merupakan langkah strategis yang integral dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Wilayah perbatasan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga dinamika sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan wilayah pertahanan yang melibatkan kehadiran militer, penggunaan teknologi canggih, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggabungkan data dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ini berhasil meningkatkan keamanan di perbatasan RI-PNG, ditandai dengan penurunan aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan pergerakan kelompok separatis. Kehadiran pos-pos militer di titik-titik strategis serta penggunaan teknologi seperti drone dan sistem pengawasan elektronik terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program-program keamanan berbasis komunitas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam implementasi strategi, termasuk keterbatasan infrastruktur, koordinasi yang kurang efektif antarinstansi, serta kendala anggaran. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari strategi ini, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, dukungan sumber daya yang memadai, serta penguatan infrastruktur.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Wilayah Pertahanan; Keamanan Perbatasan; RI-PNG.

**Abstract.** *The empowerment of defense areas along the RI-PNG land border is an integral strategic step in maintaining national stability and sovereignty. This border area faces various challenges, ranging from difficult geographical conditions to complex social dynamics. This research aims to evaluate the strategies for defense area empowerment, which involve military presence, the use of advanced technology, and active community participation in safeguarding border security. This study uses a qualitative method with a case study approach, combining data from interviews, field observations, and document studies. The results show that this empowerment strategy successfully improved security along the RI-PNG border, evidenced by the reduction of illegal activities such as smuggling and the movement of separatist groups. The establishment of military posts at strategic points and the use of technology such as drones and electronic surveillance systems have proven effective in enhancing early threat detection. Additionally, community involvement in security-based programs plays a significant role in creating a safer environment. However, this research also identifies several obstacles in the implementation of the strategy, including infrastructure limitations, ineffective coordination between agencies, and budget constraints. To ensure the long-term success of this strategy, improvements in cross-sector coordination, adequate resource support, and infrastructure strengthening are necessary.*

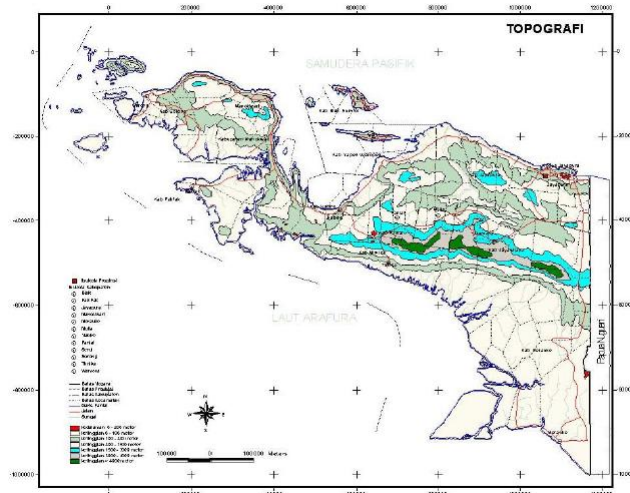
**Keywords:** Defense Area Empowerment; Border Security; RI-PNG.

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geostrategis yang unik, terletak di persimpangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dihubungkan oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Keberagaman ini membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Dengan total 17.499 pulau yang membentang dari timur ke barat, Indonesia juga memiliki tiga daerah perbatasan darat dengan negara tetangga, yakni Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Di sisi laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, termasuk India, Singapura, dan Australia. Namun, setiap wilayah perbatasan menghadapi tantangan dan masalah yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan konflik.

Salah satu perbatasan yang menarik perhatian adalah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (RI-PNG). Wilayah ini memegang peranan strategis dalam keamanan nasional, namun sering kali dihadapkan pada tantangan keamanan yang kompleks, seperti penyelundupan, migrasi ilegal, dan ancaman non-tradisional lainnya. Perbatasan darat RI-PNG dikenal memiliki kondisi geografis yang sangat sulit, mencakup hutan lebat, pegunungan, dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tantangan-tantangan tersebut diperparah dengan adanya ancaman keamanan yang disebabkan oleh kelompok separatis, khususnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta maraknya aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata. Dalam kondisi demikian, penguatan strategi pertahanan di wilayah ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan. Melalui pemberdayaan wilayah pertahanan, diharapkan tercipta sinergi antara upaya militer dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Situasi ini menuntut pemerintah dan TNI untuk tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga menerapkan pendekatan pemberdayaan wilayah yang komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di perbatasan. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang aman dan terkendali, sehingga stabilitas keamanan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Berikut adalah Peta Batas Wilayah RI-PNG:



**Gambar 1. Peta Batas Wilayah RI-PNG**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pertahanan, khususnya dalam konteks pemberdayaan wilayah pertahanan dan keamanan perbatasan. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai strategi pemberdayaan yang efektif dan memberikan referensi penting bagi peneliti lain yang berkecimpung dalam studi pertahanan dan keamanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan landasan teoritis bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu-isu keamanan perbatasan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan pengamanan perbatasan dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah terkait untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya pengamanan perbatasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi TNI dalam mengembangkan strategi operasional pengamanan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan militer, tetapi juga memasukkan elemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan dalam konteks peningkatan keamanan perbatasan darat RI-PNG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah diterapkan, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pemberdayaan wilayah pertahanan. Dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumen, diharapkan penelitian ini dapat

---

memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan dan bagaimana strategi pemberdayaan dapat berkontribusi pada keamanan dan stabilitas nasional.

## 2. Tinjauan Pustaka

**Teori Implementasi.** Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar lembaga, dan karakteristik agen pelaksana. Tesis ini akan mengevaluasi interaksi faktor-faktor tersebut dalam konteks lokal, termasuk analisis terhadap kebijakan, alokasi sumber daya, dan dinamika di lapangan.

**Teori Keamanan.** Barry Buzan mengemukakan pendekatan "Sektor Keamanan" yang menyeluruh, meliputi aspek militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tesis ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan tidak hanya memperkuat kapasitas militer, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat perbatasan, dengan tujuan memperkuat aspek non-militer dari keamanan.

**Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.** John Paul Lederach mengembangkan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan yang mengintegrasikan keamanan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Tesis ini akan menganalisis bagaimana prinsip pemberdayaan komunitas lokal diterapkan oleh TNI dan pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap stabilitas dan ketahanan lokal di wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan keamanan.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dirancang untuk menganalisis pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI-PNG). Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi strategis di sepanjang garis perbatasan, yang mencakup pos jaga TNI dan daerah-daerah yang dikenal rawan konflik, serta area pemukiman masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan situasi keamanan di sekitarnya. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Januari hingga Maret 2024, yang dipilih untuk memastikan pengumpulan data pada saat kondisi aktual di lapangan dapat terpantau dengan baik, serta untuk menangkap dinamika sosial yang terjadi.

Subjek penelitian terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengamanan perbatasan, termasuk anggota TNI yang bertugas di pos jaga, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat lokal yang terdampak oleh kebijakan pengamanan. Pemilihan subjek

---

dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan kriteria relevansi, pengalaman, serta kontribusi masing-masing narasumber dalam konteks pengamanan perbatasan. Dalam hal ini, peneliti juga melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam isu-isu sosial dan keamanan, sehingga mendapatkan perspektif yang lebih beragam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilaksanakan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pengalaman, pandangan, dan kebutuhan subjek terkait situasi di perbatasan. Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan narasumber mengemukakan informasi secara bebas dan mendalam. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat dan aparat keamanan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai interaksi sosial dan dinamika di lapangan. Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis kebijakan terkait pengamanan perbatasan, laporan-laporan pemerintah, serta publikasi yang relevan, guna mendapatkan konteks yang lebih luas tentang isu yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Peneliti juga melakukan validasi hasil dengan melibatkan beberapa narasumber yang telah diwawancarai untuk memperoleh konfirmasi atas temuan yang diperoleh. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan strategi pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan RI-PNG, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan keamanan di daerah tersebut. Melalui metodologi yang sistematis dan partisipatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan strategi pengamanan yang lebih baik di wilayah perbatasan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

#### **Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah Perbatasan**

---

Wilayah perbatasan RI-PNG memiliki bentang alam yang beragam, termasuk pegunungan, dataran rendah, dan pesisir. Karakteristik geografis ini menyulitkan mobilitas dan akses transportasi, terutama di daerah pedalaman yang terpencil. Populasi di wilayah ini terdiri dari berbagai suku asli dan pendatang, dengan kepadatan penduduk yang tidak merata, yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar. Masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan yang kuat, namun hal ini juga menciptakan tantangan dalam pengawasan aktivitas lintas batas, baik yang legal maupun ilegal.

### **Kondisi Keamanan dan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan**

Situasi keamanan di wilayah perbatasan menghadapi berbagai ancaman, termasuk dari kelompok separatis dan aktivitas ilegal yang sulit terdeteksi karena kondisi geografis yang rumit. Konflik sosial juga sering muncul akibat persaingan sumber daya yang terbatas. Infrastruktur keamanan, seperti jalan dan pos pemeriksaan, masih sangat terbatas, yang menghambat efektivitas pengawasan dan respons terhadap situasi darurat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan.

### **Peran Pemerintah dan Kebijakan di Wilayah Perbatasan**

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan strategis untuk keamanan dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah daerah juga berperan dalam menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Program-program seperti Desa Mandiri Perbatasan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di wilayah ini.

### **Masalah Sosial-Ekonomi di Wilayah Perbatasan**

Masyarakat di wilayah perbatasan sering mengalami isolasi dan akses terbatas terhadap layanan dasar, yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketidakstabilan sosial sering kali diperburuk oleh konflik antar kelompok etnis, menciptakan ketegangan dalam komunitas. Selain itu, potensi ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan lintas batas tidak dimanfaatkan secara optimal karena infrastruktur yang buruk dan regulasi yang kurang mendukung, sehingga menghalangi perkembangan ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut.

---

## **Kebudayaan dan Hubungan Sosial di Wilayah Perbatasan**

Masyarakat di wilayah perbatasan memiliki ikatan budaya yang kuat, yang melampaui batas negara dan berkontribusi pada kohesi sosial. Aktivitas ekonomi lintas batas sering menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan keamanan. Hubungan erat antar komunitas dapat berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan ilegal, yang dapat mengganggu stabilitas sosial di wilayah tersebut.

### **4.2 Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Perbatasan Darat RI-PNG**

Wilayah perbatasan darat RI-PNG memiliki posisi strategis dalam aspek pertahanan, namun juga rentan terhadap ancaman dari berbagai sisi. Untuk meningkatkan keamanan, pemerintah dan instansi terkait telah menerapkan berbagai strategi pemberdayaan wilayah pertahanan yang mencakup pendekatan militer, sosial, dan ekonomi. Penguatan kehadiran militer di daerah rawan, melalui pembangunan pos-pos militer baru dan peningkatan kesiapan operasional TNI, diakui sebagai langkah penting untuk mengatasi potensi ancaman dari kelompok separatis dan memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat.

Koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah juga sangat vital, seperti yang diungkapkan oleh Informan A2. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program keamanan menjamin bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan lokal, serta memfasilitasi dialog antara militer dan masyarakat, yang membantu mengurangi potensi konflik. Selain pendekatan militer, partisipasi masyarakat lokal dalam program keamanan berbasis komunitas juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menjaga ketertiban.

Teknologi modern, seperti sistem pengawasan elektronik dan drone, berperan penting dalam operasi pengamanan di wilayah perbatasan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif di daerah terpencil dan mendukung deteksi dini terhadap ancaman. Aspek ekonomi juga menjadi perhatian, dengan program pengembangan pertanian lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal. Dukungan dari instansi non-militer, seperti Bea dan Cukai, sangat penting untuk pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah perbatasan.

Evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan menunjukkan hasil yang bervariasi. Meskipun ada penurunan aktivitas ilegal di beberapa area yang lebih terawasi, masih terdapat tantangan di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau. Keberhasilan program keamanan

---

berbasis komunitas sangat bergantung pada dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga memerlukan pemeliharaan dan pembaruan agar tetap efektif. Meskipun strategi pemberdayaan ekonomi telah memberikan dampak positif, banyak program yang perlu ditingkatkan keberlanjutannya karena kurangnya dukungan infrastruktur dan pendanaan.

Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan perbaikan dalam dukungan infrastruktur, pengawasan yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan agar strategi ini dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam jangka panjang.

#### **4.3 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi strategi pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan darat RI-PNG terbukti efektif dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Penguatan kehadiran militer menjadi salah satu faktor kunci, di mana pembangunan pos-pos militer baru dan peningkatan patroli rutin oleh TNI secara signifikan mengurangi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Kehadiran pos-pos militer sebagai pusat kendali meningkatkan respons terhadap ancaman keamanan, sementara infrastruktur pendukung, meskipun masih terbatas, telah memfasilitasi mobilitas pasukan dan distribusi logistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kehadiran militer yang kuat berkontribusi pada penurunan kejahatan lintas batas.

Di samping penguatan militer, pelibatan masyarakat lokal dalam program keamanan berbasis komunitas juga terbukti meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi ancaman. Masyarakat dilatih untuk mengenali potensi ancaman dan dilibatkan dalam patroli serta pelaporan aktivitas mencurigakan. Hal ini mencerminkan teori partisipasi masyarakat, yang menyatakan bahwa keterlibatan lokal dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keamanan wilayah. Pemanfaatan teknologi modern, seperti drone dan sistem pengawasan elektronik, telah menjadi komponen penting dalam strategi ini. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif di daerah yang sulit dijangkau, dengan pemantauan real-time dan respons yang lebih cepat terhadap situasi darurat. Namun, tantangan dalam koordinasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah masih perlu diatasi untuk

---

memastikan kelancaran implementasi strategi. Meskipun ada peningkatan dalam koordinasi, penyelarasan kebijakan dan komunikasi masih menjadi kendala.

Keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi ini. Kondisi jalan yang buruk dan minimnya fasilitas transportasi menghambat mobilitas pasukan dan distribusi logistik, yang berdampak pada efektivitas program-program lainnya. Dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat diperlukan untuk keberhasilan strategi pemberdayaan, dengan kebijakan yang terintegrasi mencakup aspek pertahanan, ekonomi, dan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menjawab hipotesis bahwa strategi pemberdayaan wilayah pertahanan yang mengintegrasikan penguatan militer, pelibatan masyarakat, dan teknologi modern akan meningkatkan keamanan dan stabilitas di perbatasan RI-PNG. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan RI-PNG merupakan elemen penting dalam strategi nasional untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Keberhasilan dari strategi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat efektivitas implementasinya. Faktor-faktor pendukung yang utama meliputi dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, ketersediaan sumber daya yang memadai, keterlibatan aktif masyarakat lokal, dan penggunaan teknologi modern. Kebijakan yang terstruktur dan jelas memberikan kerangka kerja solid untuk program pertahanan, sementara sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai memperkuat efektivitas operasi di lapangan.

Namun, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dapat menghambat implementasi strategi tersebut. Keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan, terutama di Papua yang memiliki kondisi geografis yang sulit, menghambat mobilitas pasukan dan distribusi logistik. Masalah koordinasi antarinstansi, seperti antara TNI dan Polri, seringkali menyebabkan miskomunikasi yang berdampak pada respons terhadap ancaman. Selain itu, kendala anggaran menjadi penghalang bagi investasi yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan. Resistensi terhadap perubahan dari masyarakat dan institusi militer juga dapat menghambat adopsi strategi baru.

---

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari strategi pemberdayaan wilayah pertahanan, penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk terus mengatasi tantangan-tantangan ini. Upaya kolaboratif dalam meningkatkan dukungan kebijakan, sumber daya, dan keterlibatan masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan keamanan di perbatasan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan stabilitas dan kedaulatan nasional dapat terus terjaga.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemberdayaan wilayah pertahanan perbatasan darat Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG) dalam konteks keamanan nasional. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pemberdayaan ini secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan keamanan di wilayah perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pos militer dan personel di titik-titik strategis berfungsi sebagai langkah preventif yang berhasil mengurangi aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan dan pergerakan kelompok separatis. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan mobilitas pasukan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap situasi darurat, yang sesuai dengan tujuan awal penelitian mengenai efektivitas strategi pertahanan.

Penggunaan teknologi canggih, seperti drone dan sistem pengawasan elektronik, juga terbukti memperkuat kemampuan deteksi dini dan respons terhadap ancaman. Inovasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, yaitu bahwa teknologi dapat menjadi alat yang vital dalam memperkuat keamanan nasional.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program keamanan berbasis komunitas merupakan elemen penting dalam keberhasilan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran akan isu-isu keamanan, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas wilayah. Sinergi antara militer dan masyarakat lokal menciptakan ikatan yang lebih kuat, mendukung upaya-upaya pertahanan yang lebih efektif.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan infrastruktur, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, dan kendala anggaran. Dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan sumber daya, dan kolaborasi yang lebih baik antara

---

semua elemen terkait akan menjadi kunci untuk meningkatkan stabilitas dan kedaulatan di perbatasan RI–PNG.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengembangan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang lebih terstruktur dan komprehensif menjadi sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup regulasi yang jelas, prioritas yang kuat, dan panduan operasional untuk semua instansi terkait. Alokasi anggaran yang memadai juga harus disertakan untuk mendukung proyek-proyek strategis, memastikan bahwa upaya keamanan perbatasan dapat dilaksanakan secara efektif.

Penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan dan pengendalian keamanan perlu diperluas. Pemanfaatan drone dan sistem pemantauan berbasis satelit dapat memperkuat kemampuan deteksi dini serta respons terhadap ancaman. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas pasukan dan distribusi logistik, seperti jalan dan jembatan, harus diprioritaskan. Hal ini akan meningkatkan akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, mempercepat respons terhadap situasi darurat, dan meningkatkan efektivitas operasi keamanan.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam program keamanan berbasis komunitas harus diperkuat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan ancaman, serta program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran keamanan, akan membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan melalui dialog yang terbuka akan meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan.

Untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi, diperlukan mekanisme yang lebih baik, termasuk forum rutin untuk memastikan semua instansi bekerja harmonis. Program pelatihan bersama penting untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam menghadapi ancaman. Penerapan sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga harus diterapkan untuk menilai efektivitas strategi yang ada dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan RI–PNG dapat ditingkatkan, mendukung stabilitas dan kedaulatan nasional secara optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Ady, M. (2020). Analisis jejaring sosial untuk manajemen pengelolaan perbatasan antara negara. *Jurnal Agregasi*, 8(2).
- Alvaro, R., Aida, A. N., & Syafri, R. A. (2023). Analisis transformasi struktur ekonomi pada daerah otonom baru. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 176-195.

- 
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA.
- Dahuri, R., dkk. (2004). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.
- Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interoperabilitas TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara (Studi kasus di Laut Natuna Utara). *Aliansi: Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(2), 119-128.
- Joper, J. (2018). Economic activities and their impact on social structures in the border regions of Papua. *Journal of Development Policy*, 33(4), 150-165.
- Kalalo, D. P., & Ohoiwutun, M. (2020). Transboundary relations between Indonesia and Papua New Guinea: A socio-cultural analysis. *Journal of Southeast Asian Studies*, 25(4), 67-82.
- Kennedy, P. S. J., Toruan, R. L., & Tobing, S. J. L. (2022). Diskusi dan pemberian pemahaman mengenai pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Dili Institute of Technology. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 348-356.
- Lestari, E., & Widodo, Y. (2019). Geographical challenges in the management of Indonesia-Papua New Guinea border areas. *Journal of Borderland Studies*, 34(1), 15-28.
- Mardamsyah, A., Wiranto, S., Sitorus, H., Hipdizah, H., Saptono, D., & Simatupang, H. (2022). Strategi integrasi komando gabungan wilayah pertahanan I dan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau pada operasi militer dalam mendukung kampanye militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 3107-3114.
- Mulyadi, Dadang D., Prakosor, L. Y. (2021). Pemberdayaan wilayah pertahanan darat di Kodam II/SWJ guna mewujudkan strategi pertahanan pulau-pulau besar. *Jurnal Binawakya*, 16(3).
- Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam perspektif strategi perang semesta. *Pendidikan Tambusai*.
- Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political policy for the Papuan issue in the context of national defense.
- Prakoso, L. Y. (2020). Penguatan pertahanan negara melalui peningkatan keamanan laut di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. [Penerbit atau lembaga terkait].
- Prakoso, L. Y. (2020). Strategic infrastructure development in Papua border region: A geographical perspective. *Indonesian Journal of Geography*, 52(3), 234-245.

- 
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Pugu, M., & Yani, Y. M. (2019). Human security for border society: A case study at WARIS community at the borders of RI-PNG. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1).
- Rumbiak, M. (2018). The economic and security implications of border management in Papua. *Papua Journal of Social Sciences*, 11(2), 89-102.
- Suhendrawan, D., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, A., Parwata, I. N., ... & Purwantoro, S. A. (2023). Penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua guna menghadapi potensi ancaman dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3319-334.
- Suhirwan, L. Y. (2018). Strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Manado Sulawesi Utara tahun 2017. *Indonesia Qualitative Researcher Association (IQRA)*.
- Sukmawati S, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Taufik, M. (2022). Implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan masyarakat nelayan oleh Pangkalan TNI Al Tegal. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 399-404.
- Teturan, F. (2019). Demographic characteristics and social dynamics of the Papua border region. *Papua Research Journal*, 14(2), 200-215.
- Wibowo, I. A., Syam, B. M., & Purwoko, A. A. (2023). Pengaruh kompetensi dan komunikasi sosial prajurit Kodim 1417/Kendari terhadap pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, 10(1), 60-73.